

Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah Dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Terhadap Manajemen Aset Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Khairuna*

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Serambi Mekkah

Cut Hamdiah

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Serambi Mekkah

Rahmah Yulianti

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Serambi Mekkah

*Corresponding Author: khairuna@serambimekkah.ac.id

Abstrak. Penelitian ini merupakan studi empiris tentang pengaruh kualitas aparatur daerah dan sistem informasi keuangan daerah terhadap manajemen aset pada pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas aparatur daerah dan sistem informasi keuangan daerah baik secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Populasi penelitian adalah seluruh pejabat pemegang barang dan pengurus barang pada pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah sebanyak 69 orang atau masing-masing SKPD mewakili 3 (tiga) pejabat. Karena jumlah populasi kurang dari 100 maka seluruh populasi tersebut dijadikan sebagai sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan membagikan lembaran pertanyaan (kuesioner) terbuka kepada responden. Data mentah dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menjelaskan kualitas aparatur daerah berpengaruh terhadap manajemen aset pada pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap manajemen aset pada pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Kualitas aparatur daerah dan sistem informasi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen aset pada pemerintah Kabupaten Aceh Besar. R^2 menjelaskan peran variabel kualitas aparatur daerah dan sistem informasi keuangan daerah dalam mempengaruhi manajemen aset pada pemerintah Kabupaten Aceh Besar relative lebih kuat dan dominan di banding variabel lainnya yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

Kata Kunci:
Kualitas aparatur daerah;
sistem informasi keuangan daerah; Manajemen Aset

Sitasi: Khairuna, Cut Hamdia, Rahmah Yulianti (2024). **PENGARUH KUALITAS APARATUR DAERAH DAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP MANAJEMEN ASET PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR.** *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen dan Syariah*, 2(2), 24-32. Doi:10.32672/jams.v2i2.3362

PENDAHULUAN

Untuk melaksanakan tugas pemerintah dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial dan budaya, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, dan moneter. maka Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memerlukan sarana dan prasarana kerja meliputi sejumlah aset bergerak maupun aset tetap. Aset-aset tersebut di peroleh mlalui beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Sejak ditetapkannya kewajiban penyusunan neraca sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah, maka manajemen aset menjadi kegiatan yang semakin insentif dilaksanakan. Namun demikian lemahnya kompetensi SDM dan sistem informasi membuat banyaknya masalah yang terjadi dalam manajemen aset.

PENGARUH KUALITAS APARATUR DAERAH DAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP MANAJEMEN ASET PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

Manajemen aset adalah cara dan ciri dalam mengatur, merencanakan, mendesain, dan memonitor dalam proses mengakuisisi, memelihara, memperbarui, dan pembuangan segala bentuk infrastruktur dan aset tetap, untuk mendukung pelayanan publik (Safarina et.al, 2015). Manajemen aset adalah suatu proses yang sistematis guna memelihara, memperbarui, dan mengoperasikan dengan biaya efektif (Hidayat, 2012:4). Tahapan pengelolaan barang milik daerah meliputi: perencanaan kebutuhan dan penganggaran; pengadaan; penggunaan; pemanfaatan; pengamanan dan pemeliharaan; penilaian; penghapusan; pemindahtanganan; penatausahaan; pembinaan, pengawasan dan pengendalian (PP No 27 Tahun 2014).

Namun saat ini muncul permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah Kabupaten Aceh Besar. Masalah tersebut terutama disebabkan oleh buruknya manajemen aset dari pemerintah daerah. Sejak saat perencanaan dan pengadaan aset, penggunaan hingga penghapusan, manajemen aset tidak luput dari berbagai kerawanan kecurangan yang membuat banyak aset pemerintah yang dilaporkan dengan nilai tidak wajar. Banyak faktor yang mempengaruhi manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar termasuk di antaranya kualitas aparatur pemerintah, regulasi dan sistem informasi manajemen (Azhar, 2013, Tangke 2015; Arsyati, 2008).

Kualitas sumber daya manusia aparatur adalah potensi diri para aparatur, mencakup pengetahuan, etos kerja, sikap, keterampilan, kesehatan, kedisiplinan, loyalitas kerja dan kejujuran (Mangkuprawira, 2009:183). SDM aparatur yang berkualitas dapat diukur dari tindakan konstruktif, percaya diri, mempunyai rasa tanggungjawab, memiliki rasa cinta terhadap pekerjaan, mempunyai pandangan jauh kedepan, dan mampu menyelesaikan persoalan (Darmawan, 2013: 2).

Namun Pemerintah Kabupaten Aceh Besar masih dihadapkan dengan masalah rendahnya kualitas aparatur pemerintah. Dari sejumlah pejabat eselon yang diangkat dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah tidak semuanya memiliki kompetensi dan integritas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Saat ini masih terdapat pejabat yang belum memenuhi kompetensi dan profesionalisme dalam bekerja seperti kurangnya tindakan konstruktif, kurang mempunyai rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan, kurang inovasi dengan pandangan jauh kedepan, dan kurang mampu menyelesaikan persoalan secara cepat.

Meskipun sekarang banyak aparatur pemerintah yang telah berpendidikan sarjana (S1) dan kompetensi mereka tentang manajemen aset terus ditingkatkan melalui berbagai program Diklat teknis, namun pemahaman mereka terhadap aset daerah masih relatif rendah. Kurangnya kemauan dan kemampuan pejabat untuk mengelola aset daerah secara lebih intensif membuat manajemen aset pada pemerintah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar masih perlu dipertanyakan. Kualitas aparatur daerah berpengaruh terhadap manajemen aset (Azhar, 2013; Tangke 2015; Arsyati, 2008).

Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan pemerintah daerah (PP No.56 tahun 2005). Ditengah meningkatnya kecendrungan keurangan serta lemahnya kualitas SDM maka Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) sangat di perlukan agar tujuan pengelolaan keuangan daerah dapat tercapai.

Pengelolaan aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menjadi kegiatan yang kompleks karena melibatkan banyak tahapan mulai dari pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian sistem informasi keuangan daerah merupakan perangkat penting yang harus ada dalam mendukung aktivitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan

asset tetap. Sistem Informasi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap manajemen aset (Azhar, 2013; Tangke 2015; Arsyati, 2008).

Banyak keputusan yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dalam kegiatan manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Sistem informasi lengkap, benar dan uptodate akan dapat memberi alternatif sebaik-baiknya dalam pengambilan keputusan tersebut sehingga pengadaan, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akan semakin baik.

Walaupun perangkat Sistem Informasi Keuangan Daerah telah tersedia secara memadai, namun saat ini masih terdapat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum dapat memanfaatkan sistem tersebut secara lebih otomatis sehingga ada sejumlah kegiatan manajemen aset yang masih ditangani secara manual. Hambatan dalam penerapan sistem Informasi Keuangan Daerah disebabkan oleh rendahnya kemauan pejabat daerah untuk menerapkan sistem tersebut secara komprehensif karena kurangnya pemahaman dan adanya motif untuk melakukan kecurangan.

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah kualitas aparatur daerah dan sistem informasi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
2. Apakah kualitas aparatur daerah secara parsial berpengaruh terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
3. Apakah sistem informasi keuangan daerah secara parsial berpengaruh terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan pada 28 instansi Pemerintah di Kabupaten Aceh Besar. Objek penelitian ini adalah data-data yang berhubungan dengan manajemen aset, kualitas aparatur daerah dan sistem informasi keuangan daerah. Sementara subjek penelitian adalah pejabat pemegang barang dan pengurus barang.

Populasi penelitian ini adalah kepala Sub Bagian Keuangan, Sekretaris dan Bendaharawan pada seluruh SKPD di Kabupaten Aceh Besar yang berjumlah sebanyak 23 SKPD. Jumlah sampel penelitian sebanyak 69 pejabat atau ekuivalen dengan jumlah SKPD yang terdiri dari 2 Sekretariat, 10 Dinas, 8 Badan dan 2 Kantor. Penarikan sampel ini berpedoman pada pendapat Arikunto (2009:134) yang mengatakan bahwa jika populasi kurang dari 100 lebih baik semua diambil sebagai sampel sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Jumlah sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1.
Populasi dan Sampel Penelitian

No	DINAS	SAMPEL
1	SEKRETARIS	
	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar	3
	Sekretaris DPRD	3
2	DINAS	
	Dinas Syariat Islam	3
	Dinas Pendidikan	3
	Dinas Kesehatan	3
	Dinas Bina Marga dan Cipta Karya	3
	Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Telematika	3
	Dinas Peternakan	3
	Dinas Perindag, Koperasi Dan UKM	3

PENGARUH KUALITAS APARATUR DAERAH DAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP MANAJEMEN ASET PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

	Dinas Kelautan dan Perikanan	3
	Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura	3
	Dinas Kehutanan dan Perkebunan	3
3	BADAN2	
	Badan Kesbangpolinmas	3
	Badan Pemberdayaan Masyarakat	3
	Inspektorat	3
	Bappeda	3
	Badan Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	3
	Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran	3
	Badan Pertamanan, Lingkungan Hidup dan Kebersihan	3
	Badan Penyuluhan dan Ketahanan tanaman pangan	3
4	KANTOR	
	Kantor Perpustakaan Dan Arsip	3
	Satuan Polisi Pamong Praja Dan WH	3
	Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah	3
	Jumlah	69

Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang terdiri dari manajemen aset, kualitas aparatur daerah dan Sistem informasi keuangan daerah. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perorangan (Sekaran, 2011:75). Pengumpulan primer dilakukan dengan teknik kuesioner.

Metode Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Regresi merupakan teknik statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh antara dua atau lebih variabel serta pengaruh secara parsial dan simultan. Persamaan model empiris yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Manajemen aset

X₁ = Kualitas aparatur daerah

X₂ = Sistem informasi keuangan daerah

β₁, β₂ = Koefisien regresi X₁, X₂

α = Konstanta

ε = Epsilon

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian dilakukan menggunakan *parameter regresi linier* berganda dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengujian secara bersama-sama.

- Ho₁: β₁=β₂=0: maka menolak Ho dan menerima Ha, artinya kualitas aparatur daerah dan sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

- Ha₁: β₁=β₂≠0: maka menolak Ha dan menerima Ho, artinya kualitas aparatur daerah dan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

2. Pengujian secara parsial.

- $H_{02}:\beta_1=0$: maka menolak H_0 dan menerima H_a , artinya Kualitas aparatur daerah tidak berpengaruh terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- $H_{a2}:\beta_1 \neq 0$: maka menolak H_a dan menerima H_0 , artinya kualitas aparatur daerah berpengaruh terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- $H_{03}:\beta_2=0$: maka menolak H_0 dan menerima H_a , artinya Sistem informasi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
- $H_{a3}:\beta_2 \neq 0$: maka menolak H_a dan menerima H_0 , artinya sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regresi Linier Berganda.

Untuk keperluan penelitian dengan menggunakan program SPSS, hasil regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.441	0.469		1.738	0,087
	Kualitas aparatur daerah	0.526	0.126	0.387	4.166	0,000
	Sistem informasi keuangan daerah	0.574	0.112	0.475	7.360	0,000

Sumber: Data Primer (diolah), 2023

Berdasarkan Tabel 2 dapat dibuat persamaan linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,441 + 0,526X_1 + 0,574 X_2 + \varepsilon$$

Koefisien Korelasi dan Determinasi

Untuk menganalisis hubungan antara variabel penelitian juga digunakan analisis formulasi korelasi dan determinasi. Korelasi (r) positif kuat apabila hasil korelasi mendekati 1 atau sama dengan 1. Korelasi negatif kuat apabila hasil korelasi mendekati -1 atau sama dengan -1. Tidak ada korelasi apabila hasil korelasi mendekati 0 atau sama dengan 0. Sementara korelasi determinasi (r^2) menjelaskan sejauhmana kontribusi hubungan satu variabel dengan variabel lainnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3
Hasil Analisis Korelasi dan Korelasi Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0.726 ^a	0.527	0.513

Sumber: Data Primer (diolah), 2023

Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis Secara Bersama-sama

H_1 : Nilai $\beta_1 = 0,445$ dan $\beta_2 = 0,703$, berdasarkan nilai tersebut maka $\beta_1 = \beta_2 \neq 0$ ($\beta_i \neq 0$), sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis nul (H_0) di tolak, dan hipotesis alternatif (H_a) di

PENGARUH KUALITAS APARATUR DAERAH DAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP MANAJEMEN ASET PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

terima. Artinya kualitas aparatur daerah dan sistem informasi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

b. Pengujian Hipotesis Secara Parsial

H₂: Nilai $\beta_1 = 0,445$, berdasarkan nilai tersebut maka $\beta_1 \neq 0$, sehingga dapat diuraikan bahwa hipotesis nul (H₀) di tolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Artinya bahwa kualitas aparatur daerah berpengaruh terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

H₃: Nilai $\beta_2 = 0,703$, berdasarkan nilai tersebut maka $\beta_2 \neq 0$, sehingga dapat diuraikan bahwa hipotesis nul (H₀) di tolak dan hipotesis alternatif (H_a) diterima. Artinya bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian hipotesis maka didapat dalam variabel X₁ dan X₂ memberi pengaruh terhadap variabel Y, sehingga kualitas aparatur daerah dan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Nilai regresi linier berganda dapat dikemukakan bahwa nilai konstanta adalah sebesar = 0,560, nilai tersebut menjelaskan bahwa jika kualitas aparatur daerah dan sistem informasi keuangan daerah tidak mengalami perubahan, maka manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar secara konstan berada pada posisi 0,560 unit skala likert.

Kualitas aparatur daerah berpengaruh terhadap manajemen aset. Dari hasil analisis regresi diperoleh koefisien pengaruh variabel kualitas aparatur daerah sebesar = 0,445 unit skala likert, menjelaskan setiap meningkatnya kualitas aparatur daerah 1 (satu) unit skala likert maka akan dapat meningkatkan manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian jika kualitas aparatur daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat ditingkatkan maka manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar juga akan semakin baik. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azhar (2013) tentang pengaruh kualitas aparatur daerah, regulasi, dan sistem informasi terhadap manajemen aset. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah berpengaruh terhadap manajemen aset.

Kemudian sistem informasi keuangan daerah juga menjadi salah satu faktor yang ikut mempengaruhi manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dari hasil analisis regresi diperoleh koefisien pengaruh variabel sistem informasi keuangan daerah sebesar = 0,703 unit skala likert, menjelaskan setiap meningkatnya sistem informasi keuangan daerah sebesar 1 (satu) unit skala likert maka akan dapat meningkatkan manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian jika sistem informasi keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dapat ditingkatkan maka manajemen aset juga akan semakin baik. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azhar (2013) tentang pengaruh kualitas aparatur daerah, regulasi, dan sistem informasi terhadap manajemen aset. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap manajemen aset.

Koefisien korelasi (R) sebesar 0,854 atau 85,4% menjelaskan secara positif terdapat hubungan antara variabel kualitas aparatur daerah dan sistem informasi keuangan daerah dengan manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan keeratan hubungan 85,4%. Hubungan tersebut tergolong sedang.

Korelasi determinasi (R²) sebesar 0,729 atau 72,9% menjelaskan, kemampuan variabel kualitas aparatur daerah dan sistem informasi keuangan daerah dalam menjelaskan variabel manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah sebesar 0,729 atau 72,9%.

Sementara nilai sisa sebesar 0,221 atau 22,1% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kualitas aparatur daerah dan sistem informasi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Kualitas aparatur daerah berpengaruh terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan nilai pengaruh sebesar 0,445.

Sistem informasi keuangan daerah berpengaruh terhadap manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dengan nilai pengaruh sebesar 0,703.

Nilai korelasi R sebesar 82,6% menjelaskan terdapat hubungan antara variabel kualitas aparatur daerah dan sistem informasi keuangan daerah dengan manajemen aset pada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah positif dan relatif kuat

Nilai R Square (R^2) sebesar 68,2% menjelaskan pengaruh dua variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 68,2%. Sedangkan sisanya 31,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto (2009) **Prosedur Penelitian**. Jakarta: Reneka Cipta.
- Arsyati et.al (2008) Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Keuangan Terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan PNPB Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah. **Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi** Program Magister Sains Akuntansi Unsyiah
- Azhar, Iqlima (2013) Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Regulasi, Dan Sistem Informasi Terhadap Manajemen Aset(Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Aceh Besar) **Jurnal Akuntansi** Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Aceh Besar.
- Baridwan, Zaki (2013) **Sistem Informasi Akuntansi**, Yogyakarta: BPFE.
- Barthos, Basir (2012) **Manajemen Sumber Daya Manusia**, Bumi Asara, Jakarta.
- Danim, Sudarwan (2011) **Transformasi Sumber Daya Manusia**. Jakarta: Bumi Aksara
- Darmawan (2013) **Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi**. Pena Semesta: Suarabaya.
- Haryono, Arik (2007) **Modul Prinsip dan Teknik Manajemen Kekayaan Negara**. Tangerang: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Pusdiklat.
- Hidayat, Muchtar, (2012), **Manajemen Aset (Privat dan Publik)**, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Helmy Ella (2012) Rancang Bangun Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada SKPD Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kepulauan Sangihe, **Tesis** Program Studi Magister Sistem Informasi Universitas Diponegoro
- Ikatan Akuntan Indonesia (2011) **Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)**, Cetakan ke empat, Buku satu, Jakarta: Salemba
- IKAPI (2010) *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Fokus
- Laudon**, Kenneth C. (2014), **Sistem Informasi Manajemen** Edisi 8, Penerbit. Andi., Yogyakarta
- Mangkuprawira, Sjafri (2009) **Bisnis Manajemen dan Sumber Daya Manusia**. Jakarta: Gramedia
- Matindas, R (2010) **Manajemen Sumber Daya Manusia; lewat Konsep AKU (Ambisi, Kenyataan dan Usaha)**. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

PENGARUH KUALITAS APARATUR DAERAH DAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP MANAJEMEN ASET PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

- Ndraha, Taliziduhu (2010) **Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia**, Jakarta : Rineka Cipta
- Nawawi, Zaidan (2013) **Manajemen Pemerintahan**. Jakarta: Raja Grafindo.
- Nugroho, Eko (2010) **Sistem 54 nasi Manajemen: Konsep, Aplikasi dan Perkembangan**. Yogyakarta .
- Pemerintah Republik Indonesia (2010) **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010** Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Pemerintah Republik Indonesia (2014) **Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014** Tentang Barang milik daerah .
- Pemerintah Republik Indonesia (2006) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 **Tentang Barang Milik Daerah**.
- Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 **tentang Perbendaharaan Negara**.
- Pemerintah Republik Indonesia Permendagri No.17/2007 tentang **Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah**
- Pemerintah Republik Indonesia PP No.56 Tahun 2005 Tentang **Sistem Informasi Keuangan Daerah**
- Puspitawati, Lilis dan Sri Dewi Anggadini (2011) **Sistem Informasi Akuntansi**. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Rahardjo, Budi (2009) Pentingnya Manajemen Aktiva Dalam Menunjang Akurasi Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan, **Jurnal Fokus Pengawasan** No. 24 Tahun VI Triwulan IV 2009.
- Rahayu, Nuraini et. al (2014)Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Daerah Pada Pengadilan Tinggi Agama Manado **Jurnal EMBA Vol 2 No1** Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado .
- Raymond, George (2008) Sistem Informasi Manajemen**, Andi, Yogyakarta
- Rudianto (2009) **Pengantar Akuntansi**. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Priyatno, Duwi (2012) **Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab**. Gaya Media, Yogyakarta
- Safarina, Indah et.al (2015) Perencanaan Arsitektur Perusahaan untuk Pengelolaan Aset di PT. Musdalifah Group menggunakan Kerangka Kerja Zachman **Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence Vol. 1, No. 2**, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga
- Samryn (2015) **Pengantar Akuntansi**, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Soemarso S.R (2009) **Akuntansi : Suatu Pengantar**. Buku Satu Edisi Lima, Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Doli D (2007).**Manajemen Aset**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Sugiri, Slamet (2009) Akuntansi Pengantar 2**. Yogyakarta : UPP STIM YKPN
- Sekaran, Uma (2011) **Metode Penelitian Untuk Bisnis**, Salemba Empat, Jakarta
- Sutabri, Tata (2010) **Sistem Informasi Manajemen**. Yogyakarta: Andi
- Sugiama, A Gima (2013), **Manajemen Aset Pariwisata**, Bandung Guardaya Intimarta
- Sutopo, Ariesto Hadi (2012) **Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Pendidikan**, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tangke, John Gamara (2015) Pengaruh Optimalisasi Manajemen Aset Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar, **Jurnal Administrasi Negara**Vol 21, No 1 STIA LAN Makasar

- Taufiq, Rohmat (2013) **Sistem Informasi Manajemen: Konsep Dasar, Analisis dan Metode Pengembangan**. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yakub (2012) **Pengantar Sistem Informasi**. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Yuniarsih, Tjuju dan Suwatno (2013) **Manajemen Sumber Daya Manusia: Teori Aplikasi dan Isu Penelitian**, Alfabeta, Bandung.